

ABSTRAK

Tingkat kasus *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya semakin mendekati titik krisis, Setiap tahun deforestasi terus meningkat dengan cepat, meskipun Pemerintah sudah mencoba berbagai langkah seperti patroli, sosialisasi, dan memberikan sanksi, meskipun upaya tersebut di dilakukan, hasil yang diharapkan masih belum tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi praktik *illegal logging*, penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III, Pendekatan penelitian yaitu deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Penanggulangan *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat penanggulangan efektif: Salah satu masalah utamanya adalah di bagian kesatuan pengelolaan hutan (BKPH IV) karena keterbatasan sumber daya manusia terutama kurangnya jumlah personel yang bertugas menjaga hutan, sarana dan prasaran yang belum memadai. Selain itu, anggaran yang sangat terbatas juga membuat situasi semakin sulit dalam mengatasi masalah *illegal logging*. Dan pada sektor komunikasi ditemukan ketidaksesuaian sosialisasi dengan tim patroli dan pemberian sanksi yang belum efektif. Selain itu, keberadaan cukong kayu yang diduga memiliki hubungan dengan oknum kepolisian semakin mempersulit penanganan masalah ini. Secara keseluruhan, kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam penanggulangan *illegal logging* di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan hambatan besar dalam sosialisasi, penegakan hukum, dan pemantauan terhadap aktivitas *illegal logging* tersebut. Diperlukan upaya serius untuk memperbaiki keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasaran, peningkatan profesionalisme dalam penegakan hukum, serta langkah-langkah strategis untuk mengatasi intervensi dan praktik negoisasi yang menghambat upaya penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemerintahan, *Illegal Logging*

ABSTRACT

The level of illegal logging cases in Nagan Raya Regency is getting closer to crisis point. Every year deforestation continues to increase rapidly, even though the Government has tried various steps such as patrols, outreach and imposing sanctions, even though these efforts have been made, the expected results have still not been achieved. The aim of this research is to examine the extent of the implementation of Government policy in tackling illegal logging practices. This research was conducted in the Nagan Raya Regency Government, using Edward III's Policy Implementation Theory. The research approach is descriptive qualitative, data was collected through observation, interviews and documentation then techniques. Data analysis includes data reduction, data presentation, and data verification. The results of the research found that the implementation of illegal logging prevention in Nagan Raya Regency faces a number of challenges that hinder effective response: One of the main problems is in the forest management unit (BKPH IV) due to limited human resources, especially the lack of personnel tasked with protecting forests, facilities and inadequate infrastructure. Apart from that, the very limited budget also makes the situation increasingly difficult to overcome the problem of illegal logging. And in the communications sector, there were discrepancies in socialization with the patrol team and ineffective sanctions. Apart from that, the presence of timber barons who are suspected of having ties to police officers makes handling this problem even more difficult. Overall, the internal and external obstacles faced by tackling illegal logging in Nagan Raya Regency show major obstacles in socializing, enforcing the law and monitoring illegal logging activities. Serious efforts are needed to improve limited human resources, increase professionalism in law enforcement, as well as strategic steps to overcome intervention and negotiation practices that hinder effective law enforcement efforts.

Keywords: *Policy Implementation, government, Illegal Logging,*